BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

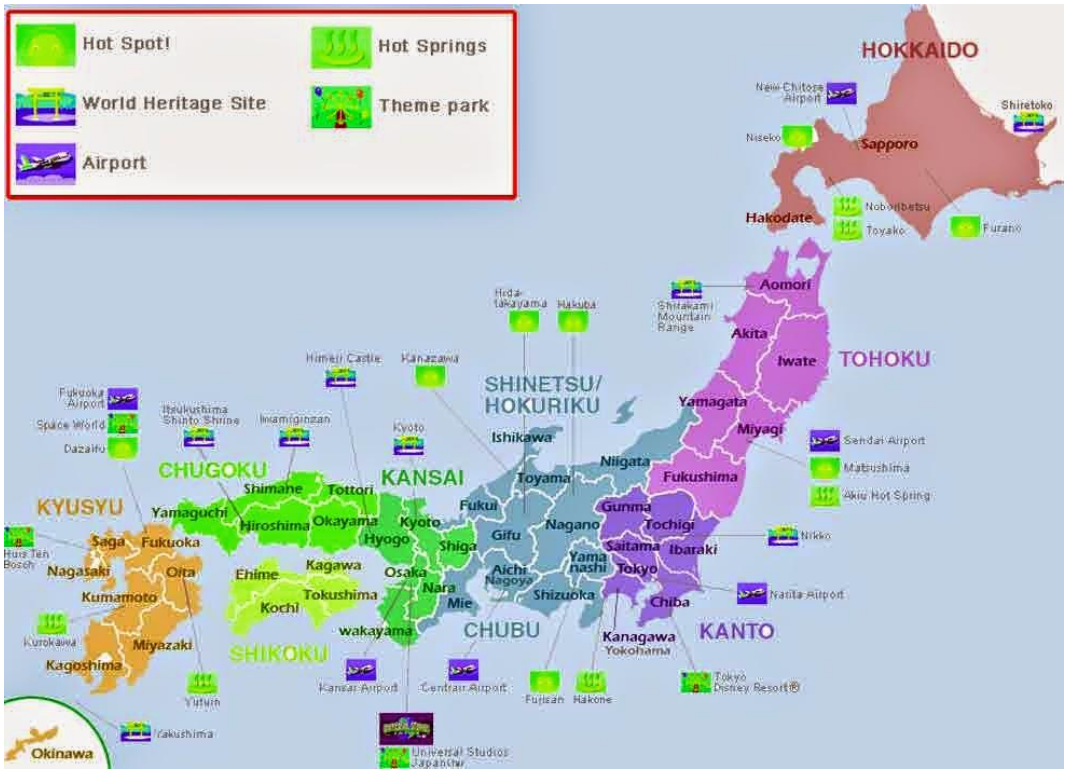
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur, memiliki luas daratan 378.000km^2 dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 127 juta orang. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer. Jepang dikelilingi lautan dimana arus hangat dan arus dingin mengalir melalui laut-laut disekitarnya, sehingga membentuk lingkungan yang mendukung berkembangnya sebagian spesies ikan.

Sebagian besar Jepang berada dalam Zona Utara beriklim sedangdan beriklim monsun yang lembab, dengan angin tenggara yang bertiup dari Samudra Pasifik selama musim panas dan angin Barat Laut yang bertiup dari benua Eurasia (Eropa-Asia) pada musim dingin.

Jepang kerap dilanda bencana alam seperti taifun, letusan gunung api, dan gempa bumi. Jepang menerapkan teknologi canggih untuk merancang bangunan-bangunan yang tahan gempa bumi dan mengamati jalur angin badai dengan tingkat ketepatan yang tinggi (http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_01.html, diakses pada 15 Mei 2015)



Sumber: (http://www.sejarah-negara.com/2014/09/peta-negara-jepang.html, diakses pada 15 Mei 2015)

Gambar 4.1
Peta wilayah Jepang

Bagian dari Jepang yang menjadi pusat atau ditempatkannya 75% basis-basis militer Amerika Serikat adalah Okinawa, salah satu perfektur yang terletak di selatan Jepang ini menanggung sebagian besar wilayahnya untuk dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat. Dimana segala sesuatunya di kontrol langsung oleh Jepang dan berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan Amerika Serikat sehingga segalanya sangat tergantung pada kebutuhan Amerika Serikat (Oktavianti, 2009: 2-4)



Sumber: (http://www.hidayatullah.com/engine/files/2013/12/jepang-okinawa-peta-pangakalan-as.jpg, diakses pada 21 Mei 2015)

Gambar 4.2
Peta Wilayah Okinawa

4.1.1.1.1 Kebijakan Luar Negeri Jepang

Gaimusho merujuk pada Departemen Luar Negeri Jepang. Layaknya negara lain, Departemen Luar Negeri Jepang memegang tanggung jawab atas perencanaan dasar dan menengah atau jangka panjang kebijakan luar negeri dari sudut pandang yang lebih luas dan mengkoordinasikan kebijakan yang dirumuskan oleh departemen lain. Penekanan khusus diletakkan pada masalah-masalah keamanan nasional dan isu-isu yang berkaitan dengan

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Departemen ini juga memainkan peranan penting apabila negara dalam keadaan gawat atau genting. Di samping itu juga mengambil alih tanggung jawab dari hal-hal berikut: pengawasan senjata dan perlucutan senjata non-proliferasi energi nuklir, dan kerjasama sains dan urusan ilmiah lainnya.

Ketika krisis melanda Jepang, Departemen Luar Negeri menempatkan prioritas bagaimana memperkuat manajemen dan sistem keamanan, yang memungkinkan pemerintah untuk segera merespon kondisi tersebut. Meskipun anggaran dan rekrutmennya yang ketat , staf Departemen Luar Negeri Jepang meningkat sebesar 72% selama tahun 1998 yang terdiri dari 22 di departemen itu sendiri dan 50 di luar negeri dalam hal pendirian perwakilan diplomatik dan konsuler. Ini menjadikan total staf di Kementerian Luar negeri Jepang sekitar 5169 orang dan 3159 staf di luar negeri di perwakilan Diplomatik dan Konsuler. Pada waktu yang sama, staf Departemen tidak hanya mengalami peningkatan kuantitas, tetapi juga melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan stafnya secara lebih efektif dan untuk merampingkan administrasi, dan disamping telah menerapkan reformasi untuk meningkatkan perekrutan dan pelatihan staf.

Sejak kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang menjalankan kebijakan luar negeri dalam bentuk diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh PM Shigeru Yoshida. Kebijakan tersebut secara resmi dijalankan sejak 1957. Diplomasi ekonomi adalah bentuk *peaceful expansion* dari ekonomi pasar luar negeri

Jepang untuk membangun ekonomi nasionalnya, yang kemudian menjadi modus vivendi dari kebijakan luar negeri negara tersebut. tetapi sejak 1977, *Yoshida Doctrine* digantikan oleh *Fukuda Doctrine* yang diproklamasikan oleh PM Takeo Fukuda yang hanya memfokuskan kebijakan luar negeri Jepang pada kekuatan ekonomi, politik dan kultural sebagai pilarnya (https://www.academia.edu/11372887/Gaimusho_dan_Kebijakan_Politik_Luar_Negeri_Jepang, diakses pada 15 Mei 2015).

4.1.1.1.2 Kekuatan Militer Jepang

Dengan jumlah 127 juta populasi Jepang, kekuatan militer yang dimiliki Jepang sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia aktif tersedia : 53,608,446 orang
2. Cadangan Sumber daya manusia : 43,930,753 orang
3. Personel Militer Aktif : 247,173 orang
4. Personel Militer Cadangan : 57,900 orang
5. Tank (Type-10) : 678 unit
6. Kendaraan Lapis Baja (AFVs) : 2,850 unit
7. Howitzer otomatis : 202 unit
8. Artileri Derek : 500 unit
9. *Multiple-Launch Rocket Systems* : 99 unit
10. Pesawat Tempur (F-2) : 1,613 unit
11. Helikopter : 741 unit
12. *Transport Aircraft* : 529 unit
13. Total Kekuatan Kapal Angkatan Laut : 131 unit
14. Kapal Selam : 16 unit
15. *Coastal Defense Craft* : 6 unit

(http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Japan, diakses pada 15 Mei 2015).

Mitsubishi Heavy Industry adalah perusahan yang bergerak di bidang industri yang merupakan perusahaan pembuat alat militer yang diperlukan Jepang. Alat militer yang dibuat disini antara lain: *Main Battle Tank* Tipe 10, Tank Tipe 11 *Recovery Vehicles,* Tank Tipe 99 *Self-Propelled* 155mm Howitzer, *Heavy Wheeled Recovery,* Kapal Penghancur ASHIGARA, Kapal Selam HAKURYU, Kapal Rudal Perusak SHIRATAKA, Pesawat Tempur F-2, F-15J, F-4EJ, SH-60K, UH-60J, SH-60J, Mesin TS1 yang digunakan pada Helikopter Observasi (OH-1), kemudian pada alat pertahanan militer lainnya seperti radar, misil, roket, torpedo, mesin detektor tambang bawah laut, *Vertical Launching Machine,*dan masih banyak lagi (https://www.mhi-global.com/products/defense.html, diakses pada 20 Agustus 2015)

Tabel 4.1
Daftar Penambahan Alat Setelah SCC *Join Statement* 2012

Nama Alat	Jumlah Unit Sebelum Kesepakatan SCC 2012	Jumlah Unit Setelah Kesepakatan SCC 2012
Tank Tipe 10	10	53
Kendaraan Tempur Lapis Baja Tipe 89	9	68
Kendaraan Tempur Manuver	4	103
Type 73 Armored Personnel Carrier	24	338

FH-70 Howitzer Derek	200	310
Kendaraan Kimia Pengintai	5	47
Type 92 Mine Clearance Vehicle	-	5
Bushmaster Protected Mobility Vehicle	-	4
Pesawat Tempur LR-2	-	7
Pesawat tempur Lr-1 MU-2	-	2
Bell Ah-1 Cobra	10	88
Helicopter OH-6D	50	106
RT 120mm *Heavy* Mortar	50	430
L16 81mm Mortar	-	5

Sumber: (http://www.mod.go.jp/e/d_act/index.html, diakses pada 21 Mei 2015)

Karena adanya perjanjian pembatasan produksi peralatan militer Jepang dengan Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya mendapat izin dari pemerintah Amerika untuk membuat pesawat dengan standard F-16 dengan Lockheed Martin sebagai sub-kontraktor (http://irwan.net/mitsubishi-f2-f-16-versi-jepang/, diakses pada 10 Agustus 2015).

Selain itu Amerika Serikat juga khawatir dengan kemampuan Jepang untuk dapat mengembangkan perangkat lunak kecuali adanya partisipasi dari Lockheed Amerika Serikat. Kemudian pemerintah Jepang dan Amerika Serikat sepakat bahwa Amerika Serikat akan menerima sebesar 40% dari nilai produksi

dan juga Jepang akan membayar kepada Amerika Serikat selama tahap produksi (http://fas.org/man/gao/gao95145.htm, diakses pada 10 Agustus 2015).

4.1.1.1.3 Kepentingan Nasional Jepang

Kepentingan Nasional adalah tujuan dan ambisi suatu negara meliputi ekonomi, militer, atau kebudayaan. Kepentingan nasional yang primer adalah mengenai kelangsungan hidup dan keamanan negara. Selain itu yang penting juga sebagai kepentingan nasional adalah kesejahteraan, pertumbuhan perekonomian yang baik dan kekuasaan. Kepentingan nasional Jepang sangat difokuskan pada terjaminnya keamanan jalur laut yang merupakan rute dari kebutuhan pokok bagi Jepang seperti minyak dan makanan karena Jepang sangat bergantung pada keperluan dari impor. Sedangkan dari sisi keamanan melihat rumitnya konflik yang ada di wilayah Timur Jauh serta kekuatan militer negara-negara tetangga Jepang. Kepentingan Nasional dari segi keamanan bagi Jepang adalah mengutamakan pencegahan musuh atau lawan potensial dari pengendalian atau mengambil tindakan bermusuhan melawan Jepang pada jalur laut.

Lalu muncul pertanyaan bagaimana Jepang mampu untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Jepang perlu mengadopsi suatustrategi, yang berarti rencana jangka panjang atau suatu tindakan yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan. Pada awalnya Jepang perlu untuk mendiskusikan bagaimana jika Jepang mampu mencapai kepentingan nasionalnya sendiri, namun Jepang juga menyadari kekurangan tersebut karena Jepang belum bisa memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri. Bila memperhatikan fakta-fakta yang ada seperti penurunan

dan penuaan populasi, situasi krisis dalam keuangan nasional, sangat sulit untuk mengharapkan Jepang bisa mencapai kepentingan nasionalnya sendiri di masa depan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan negara-negara lain terutama sangat penting bila memiliki hubungan yang sangat dekat seperti aliansi dengan negara yang memiliki kekuatan yang besar yang mempunyai pengaruh di jalur laut.

Negara yang cocok untuk dijadikan aliansi Jepang tersebut adalah Amerika Serikat yang memiliki kekuatan seperti yang kita ketahui sekarang. Selain Jepang, tampaknya Amerika Serikat juga memiliki kemauan untuk mempertahankan kekuatan yang telah Amerika Serikat miliki sejak akhir Perang Dunia II (http://www.mod.go.jp/j/publication/ronbun/18/02-02.pdf, diakses pada 15 Mei 2015).

4.1.1.2 Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang terletak di benua Amerika, memiliki luas wilayah 9.3 juta km2 dan di huni sekitar 315 juta manusia. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah Republik Federasi. Sesuai dengan namanya (serikat) Amerika Serikat terbagi menjadi 50 negara bagian. Dua negara bagian yaitu Alaska dan Hawai terletak terpisah. Alaska terletak di sebelah barat daya Kaanada dan Hawai terletak lebih jauh lagi, yaitu di tengah-tengah Samudera Pasifik.

Setiap negara bagian memiliki hak otonom atau mengatur wilayahnya sendiri. Kecuali di bidang pertahanan dan politik luar negeri yang diatur oleh pemerintah pusat.

Hasil industri merupakan salah satu komoditas ekspor paling penting bagi negara ini. Di bidang kepariwisataan Amerika Serikat juga sangat maju, karena lancarnya hubungan lalu lintas, terpeliharanya keindahan alam, banyaknya cagar alam (http://www.sejarah-negara.com/2013/09/tentang-negara-amerika-serikat.html, diakses pada 15 Mei 2015).



Sumber: (http://www.mapsofworld.com/usa/, diakses pada 15 Mei 2015)

Gambar 4.3
Peta Wilayah Amerika Serikat

4.1.1.2.1 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Secara umum berbagai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia,

dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideologi liberalisme dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terorisme, serta mewujudkan sebuah tatanan dunia baru.

Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi kapitalisme dibuat dan di internasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia, terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (*national interest*) AS semata.

Dalam bidang liberalisasi ekonomi, internasionalisasi kepentingan AS dilakukan dengan memuat suatu tatanan ekonomi internasional dengan seperangkat organisasinyaseperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Langkah paling penting dilakukan AS adalah mengubah sistem mata uang dunia dengan menjadikan dolar sebagai standar untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Tahun 1944, delegasi 44 negara yang mengadakan pertemuan di Bretton Woods menerima gagasan itu. AS bisa memaksa penggunaan dolar karena saat itu AS merupakan negara yang sangat kuat secara politik dan militer di dunia. Dolar AS sejak saat itu mendominasi dunia. Perdagangan bebas juga menjadi program utama dari WTO yang pembentukannya dipelopori AS. Tujuan utama dari liberalisasi perdagangan ini adalah untuk membuka pasar

seluruh negara-negara di dunia bagi produk unggul dan investasi negara-negara kapitalis. Dengan demikian, negara-negara berkembang akan selalu berada dibawah hegemoni AS (https://www.academia.edu/3252038/Kebijakan_Luar_Negeri_Amerika_Serikat, diakses pada 15 Mei 2015).

4.1.1.2.2 Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Kepentingan nasional yang vital adalah kondisi yang benar-benar diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kelangsungan hidup orang Amerika Serikat dan kesejahteraan di negara bebas dan aman. Kepentingan nasional yang sangat vital bagi Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1. Mencegah, menghalangi, dan mengurangi ancaman senjata nuklir, biologi, dan kimia terhadap Amerika Serikat atau pasukan militernya di luar negeri
2. Menjamin kelangsungan hidup sekutu Amerika Serikat dan kerjasama aktif AS dalam membentuk sistem internasional agar lebih berkembang
3. Mencegah munculnya kekuatan-keluatan besar yang bermusuhan atau negara gagal di perbatasan AS
4. Menjamin kelangsungan hidup dan stabilitas sistem global (perdagangan, pasar keuangan, pasikan energi dan lingkungan
5. Membangun hubungan yang produktif, konsisten dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, dengan negara-negara yang bisa menjadi lawan yang strategis, Cina dan Rusia

(http://www.mod.go.jp/j/publication/ronbun/18/02-02.pdf, diakses pada 15 Mei 2015)

Selain kepentingan nasional yang vital, ada beberapa kepentingan nasional yang dianggap penting bagi Amerika Serikat, seperti:

1. Kepentingan Nasional *Extremely Important*, merupakan sebuah kondisi dimana ada prasangkan bagi negara untuk melindungi negaranya. Kepentingan ini menyangkut pemberlakuan hukum internasional dan mekanisme bagi terlaksananya perdamaian, mencegah, dan bila memungkinkan, mengakhiri konflik besar di wilayah geografis yang penting
2. Kepentingan Nasional *Important*, adalah suatu kondisi simana kompromi memiliki tiga tingkat konsekuensi negatif yang besar bagi kemampuan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Kepentingan *important* ini menyangkut tentang penolakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara lain dan penyebaran nilai tentang pliralisme (kemajemukan), kebebasan, serta demokrasi
3. Kepentingan Nasional *Less Important*, adalah kepentingan yan tetap menjadi perhatian, tetapi mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap negara tersebut (Allison, 2000: 5-7).

4.1.1.2.3 Kekuatan Militer Amerika Serikat

Sebagai negara adidaya yang diperkuat dengan kekuatan ekonomi, sumber daya alam, dan teknologi yang mutakhir menjadikan Amerika Serikat sebagai

negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, berikut adalah paparan kekuatan militer Amerika Serikat.

1. Jumlah Penduduk : 320 juta orang
2. Sumber daya manusia tersedia : 145 juta orang
3. Personil Aktif : 1.4 juta orang
4. Personil cadangan : 1.1 juta orang
5. Tank : 8.848 unit
6. Kendaraan lapis baja : 41.062 unit
7. *Self-Propelled Guns (SPGs)* : 1.934 unit
8. Artillery derek : 1.299 unit
9. *Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs)* : 1.331 unit
10. Total Pesawat tempur : 13.892 unit
11. Pesawat pencegat : 2.207 unit
12. *Fixed-Wing Attack Aircraft* : 2,797 unit
13. Helikopter : 6.196 unit
14. Total Kapal perang : 473 unit
15. Frigat : 10 unit
16. Kapal Selam : 72 unit
17. *Aircraft Carriers* : 20 unit

(http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=United-States-of-America, diakses pada 15 Mei 2015).

4.1.1.3 Situasi Keamanan di Asia Timur



Sumber: (http://www.terradaily.com/images/china-japan-korea-mongolia-map-bg.jpg, diakses 15 Mei 2015)

Gambar 4.4
Peta Kawasan Asia Timur

Kawasan Asia Timur merupakan suatu kawasan yang menjadi pusat penting dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Kawasan ini juga merupakan ajang pertemuan peradaban barat dan timur yang akan berpengaruh bagi stabilitas keamanan dan tatanan politik regional dan global.

Dibalik potensi ekonomi yang besar dan derasnya arus perdagangan di kawasan Asia Timur, ternyata kawasan ini memiliki tingkat kerawanan dalam hubungannya satu sama lain, yang berupa masalah sengketa teritorial, ketegangan akibat konflik warisan sejarah masa lalu seperti Perang Dunia ke-2. Ancaman terhadap keamanan nasional masing-masing negara menimbulkan ketegangan dan kecurigaan sehingga memicu peningkatan kapabilitas militer.

Keamanan nasional secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Terdapat kecenderungan bahwa suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting, jika dapat menghindari perang atau terpaksa melakukannya, negara tersebut akan berusaha untuk dapat keluar sebagai pemenang.

Suatu keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan perpaduan dari ancaman dan kerawanan yang sangat erat kaitannya dengan keamanan nasional maupun internasional. Hal yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah membuat kebijakan keamanan nasional yang berfokus pada negara itu sendiri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar.

Kerentanan masalah keamanan di Asia Timur khususnya antara China dengan Jepang dan Korea Utara menjadi poin utama. Mengingat ketiganegara tersebut memegang peranan kunci dalam stabilitas kawasan dilihat dari kapabilitas militer yang mereka milikidan daya tawar politiknya masing-masing. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *Security Dilemma*, yaitu kondisi dimana keinginan suatu negara untuk memperkuat militer dianggap sebagai ancaman sehingga menimbulkan respon negara lain juga dengan memperkuat militer yang dimiliki. Akhirnya perlombaan senjata menimbulkan saling curiga antar negara

dikawasan tersebut (http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1170/BAB%20I.pdf?sequence=2, diakses pada 15 Mei 2015).

Masalah-masalah keamanan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan menjadi perhatian utama Jepang sebagiannya merupakan sisa-sisa masalah Perang Dingin seperti wilayah utara Jepang, nuklir Korea Utara, dan kepulauan Spratly. Walaupun telah ada pergerakan ke arah peredaan ketegangan di kawasan ini, seperti pembentukan hubungan diplomatik Korea Selatan-Cina, unifikasi Korea Selatan-Korea Utara dan penandatanganan perjanjian mengenai hubungan-hubungan dasar antara Korea Selatan dan Rusia, adanya persepsi dan tafsiran curiga seperti kunjungan pejabat Jepang ke kuil Yasukuni, mulai dekatnya Amerika Serikat dengan Cina yang mengundang perhatian Jepang dapat menjadi potensi konflik.

Strategi dan ukuran militer Asia Timur yaitu dengan memandang hubungan antara tiga atau lebih kekuatan militer utama dari kawasan ini. Yaitu kekuatan Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Korea Utara. Kekuatan ini dilihat dari suatu hubungan jaringan yang kompleks antara kekuatan utama dengan kekuatan negara-negara lain di Asia Timur dan implikasinya terhadap regional *balance of power* (kekuatan penyeimbang) di kawasan ini. Dimana basis keamanan Asia Timur berputar mengelilingi aktor-aktor utama, dan setiap perkembangannya terutama mengenai stabilitas keamanan sangat tergantung pada jaringan itu (Sihab, 2000, dalam http//:www.deplu.go.id).

Di kawasan Asia Timur tidak dapat dipisahkan dari berbagai masalah regional, khususnya yang menjadi ancaman bagi pertahanan dan kedaulatan Jepang seperti:

1. Konflik Maritim

   Dari hasil pengamatan pemerintahan Jepang tercatat ada beberapa aktifitas di dekat laut Jepang yang dianggap melanggar hukum internasional dan mengganggu kedaulatan Jepang seperti pada tahun 2004 Kapal selam bertenaga nuklir milik China menerobos masuk teritorial laut Jepang, dan juga aktifitas pengamatan dan pengumpulan informasi yang dilakukan kapal angkatan laut China dalam penelitian oseanografi dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang. Kemudian pada tahun 2005 kapal angkatan laut China terdeteksi bernavigasi di sekitar kilang minyak Shirakaba (Jepang). Tahun 2006 Kapal selam China muncul di sekitar kapal induk USS Kitty Hawk di perairan internasional dekat Okinawa, dalam konteks militer mendekatnya kapal asing ke kapal induk Amerika Serikat (AS) dianggap sebagai ancaman militer (http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2008/11Part1_Chapter2_Sec3.pdf. 56. Diakses pada 12 Mei 2015).

   Selanjutnya hal yang semakin memanas adalah konflik pulau yang di klaim oleh Jepang dan China. Pulau tersebut dikenal dengan nama Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China. Sengketa kepemilikan pulau tersebut membuat hubungan kedua negara semakin menegang. Jepang

dengan tegas menempuh langkah menguatkan lagi sistem militer nya dengan alasan sengketa wilayah ini mengganggu kedaulatannya. Pihak China mengecam keras sikap Jepang tersebut. Selain itu China pun terhitung lumayan sering mengoperasikan kapal angkatan laut nya untuk mendekati gugusan kepulauan yang di sengketakan tersebut, hal tersebut mendapat kecaman yang keras dari Jepang dan Amerika Serikat (http://news.liputan6.com/read/781259/sengketa-pulau-china-kecam-strategi-perang-jepang, diakses 15 Mei 2015).

Pada September 2010 Jepang menahan seorang kapten kapal China di ibukota Okinawa, Naha, dengan tuduhan Kapten kapal China tersebut melanggar kedaulatan hukum Jepang. Kemudian China pun merespon dengan menangkap empat karyawan Fujita Coorporation di Hebei, China. China pun menegaskan apabila Jepang tidak membebaskan Kapten kapal tersebut makan China akan mengambil langkah selanjutnya terhadap empat karyawan Jepang tersebut. Jepang pun pada akhirnya memutuskan untuk melepaskan Kapten kapal tersebut (http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=8080&type=99#.VdMT7bVNr3k, diakses pada 10 Agustus 2015)



Sumber: (http://www.antaranews.com/berita/420560/tiga-kapal-china-memasuki-perairan-sengketa-dengan-jepang, diakses pada 15 Mei 2015)

Gambar 4.5
Lokasi Pulau yang disengketakan Jepang dan China

2. Ancaman Rudal Korea Utara

Uji coba rudal oleh Korea Utara menjadi salah satu ancaman utama bagi Jepang terutama pengembangan rudal-rudal balistik dan juga senjata penghancur masal lainnya oleh Korea Utara. Secara khusus masalah nuklir Korea Utara memiliki pengaruh serius pada keamanan nasional Jepang, sampai akhirnya peluncuran tujuh rudal balistik Korea Utara pada 5 Juli 2006 yang memicu ketidakstabilan di kawasan Asia Timur. Korea Utara juga mengaku terus mengembangkan teknologi rudal balistik nya untuk dikombinasikan dengan nuklir yang memicu ketegangan antara Jepang dengan Korea Utara. Langkah ini diambil Korea Utara karena menganut

sistem “Militer Politik Utama” yang menekankan pentingnya mengutamakan kekuatan militer dan pasukan bersenjata (http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2008/10Part1_Chapter2_Sec2.pdf. 33. Diakses pada 12 Mei 2015).

Selain itu pada 12 Desember 2012 Korea Utara menggegerkan dunia dengan meluncurkan kembali roket jarak jauhnya yang melintasi wilayah udara Jepang. Hal ini tentu saja mengundang kemarahan pihak Jepang (http://news.liputan6.com/read/467119/kejutan-korut-luncurkan-roket-melintasi-langit-jepang, diakses pada 12 Mei 2015).

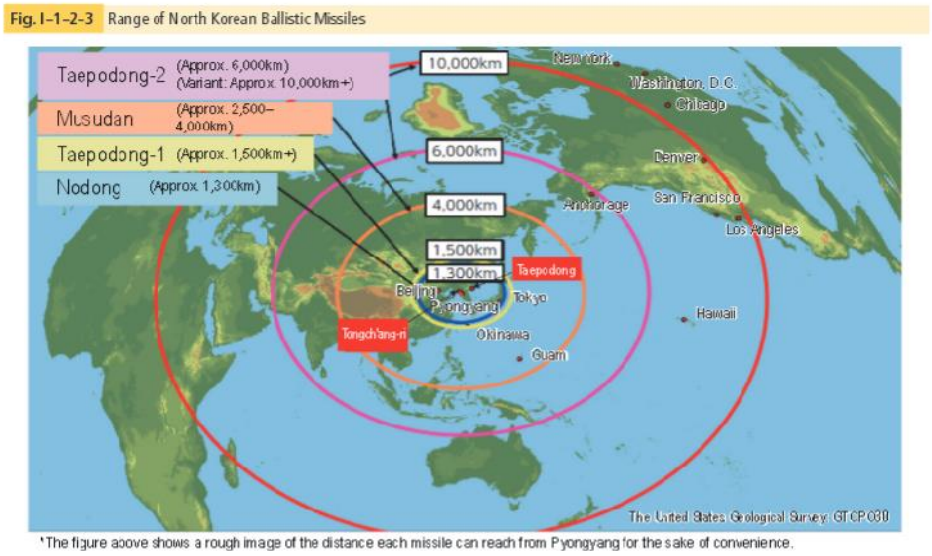
Jepang mengancam akan menembak jatuh roket Korea Utara apabila masuk kedalam wilayah Jepang. Pemerintah Jepang hanya ingin warga nya merasa aman dan tidak terganggu dengan ulah yang dilakukan Korea Utara. Walaupun alasan Korea Utara untuk menembakkan roket tersebut untuk menempatkan satelit diluar angkasa, namun Jepang dan Amerika Serikat curiga bahwa pemerintah Pyongyang berencana melakukan uji coba kemampuan roket jarak jauh untuk program nuklirnya (http://www.dw.com/id/korea-utara-luncurkan-rudal-jarak-dekat/a-15849037, diakses pada 21 Mei 2015)

Peluncuran roket oleh Korea Utara selalu membuat geram Jepang, karena pada tanggal 16 Maret 2014 Korea Utara kembali meluncurkan roket-roketnya sebanyak 18 buah berada 70 kilometer diatas laut Jepang. Peluncuran roket tersebut bertepatan dengan latihan militer tahunan antara

militer Amerika Serikat dengan militer Korea Selatan (http://news.liputan6.com/read/2023710/18-rudal-korut-terbang-lewati-laut-jepang-korsel-waspada, diakses pada 21 Mei 2015)

Pengembangan rudal-rudal Korea Utara seperti Nodong, Taepodong 1, Musudan dan yang terakhir diluncurkan pada 2012 yaitu Taepodong 2 dirasa sangat mengganggu keamanan dan kestabilan di wilayah nasional Jepang. Namun Korea Utara selalu menampik bahwa peluncuran rudal-rudalnya untuk kepentingan militer, mereka mengatakan bahwa peluncuran tersebut untuk mengirimkan satelit keluar angkasa yang ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan (http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/10_Part1_Chapter1_Sec2.pdf. 21. Diakses pada 12 Mei 2015).

Setelah meluncurkan roket yang melintasi wilayah udara Jerpang, kali ini Korea Utara akan kembali meluncurkan roketnya. Hal ini membuat Jepang kembali tidak tenang, karena dikhawatirkan akan kembali mengarah ke arah Jepang. Untuk itu Jepang melalui Menteri Pertahanannya Naoki Tanaka mengatakan negaranya akan memesan sistem senjata pertahanan sebagai antisipasi dari peluncuran nuklir oleh Korea Utara. Dan sistem pertahanan itu akan diletakan di pulau Okinawa untuk menembak jatuh roket yang bmengancam wilayah Jepang (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/03/120324_uswarnkoreanrocket.shtml, diakses pada 21 Mei 2015)



Sumber:(http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/10_Part1_Chapter1_Sec2.pdf. 21. Diakses pada 12 Mei 2015)

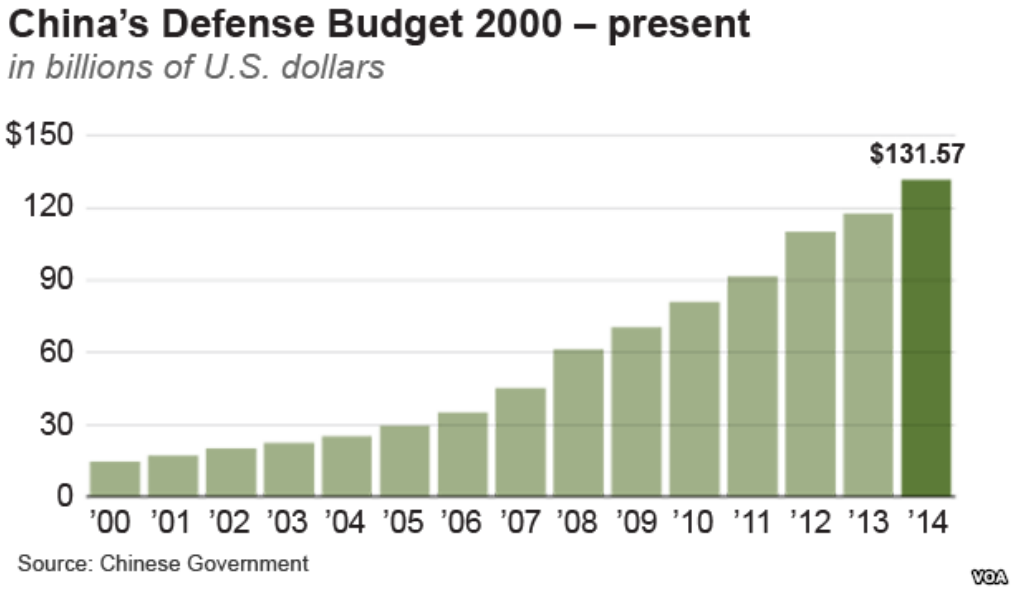
Gambar 4.6
Jarak masing-masing rudal yang bisa dicapai dari Pyongyang

3. Peningkatan Anggaran Militer Cina

Kekuatan militer Cina yang seakan tidak terbendung lagi merupakan salah satu bukti Cina untuk selalu memperkuat pertahanannya. Hal tersebut terlaksana karena anggaran militer Cina selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tentu saja ini menjadi ancaman bagi Jepang mengingat kedua negara memiliki masalah baik secara historis maupun konflik sengketa pulau.

Cina meningkatkan hampir 12,2% anggaran militernya menjadi 130 miliar dollar untuk memperkuat pertahanannya terkait sengketanya dengan Tokyo dan juga negara lainnya. Tentu saja jumlah ini mengejutkan bagi negara-negara di kawasan dan juga bagi Amerika Serikat

(http://internasional.kompas.com/read/2015/03/04/18491111/China.Tingkatkan.Lagi.Anggaran.Militer, diakses pada 27 Juli 2015)



Sumber: (http://jakartagreater.com/anggaran-pertahanan-china-2014/, diakses pada 10 Agustus 2015)

Diagram 4.1
Anggaran Militer China dari tahun 200-2014

Cina pun memiliki kapal induk dan terus mangembangkan beberapa sistem untuk kapal siluman dan rudal yang mampu menembak jatuh satelit. Cina meningkatkan sistem militernya karena Cina menganggap sebagai negara besar yang memiliki lebih dari satu miliar penduduk dan juga garis pantai yang panjang, Cina merasa anggaran militer yang mereka miliki sekarang sangatlah kecil bila dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Untuk itu Cina akan terus meningkatkan anggaran militernya dan juga memperkuat militer dan

sistem pertahanannya (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/03/120304_cina_militer.shtml, diakses pada 27 Juli 2015)

4.1.1.4 Hubungan Jepang dan Amerika Serikat di Bidang Pertahanan

Perpolitikan Jepang yang cenderung konservatif memberi kesempatan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk membangun kebersamaan kepentingan (*common interest*) dan berujung pada adanya kebutuhan bersama dalam penciptaan stabilitas keamanan wilayah. Butir-butir penting yang menjadi kepedulian Jepang bersinggungan dengan kepentingan keamananAmerika Serikat dan kebijakan luar negerinya. Peningkatan kemampuan persenjataan China dan Korea Utara, termasuk kekuatan nuklir China dan potensi nuklir Korea Utara, adalah sebagian dari agenda keamanan Jepang yang kemudian dimanifestasikan kedalam bentuk kecemasan baru.

Tingkat kecemasan yang melandasi Jepang meningkatkan kapabilitas pertahanannya memberi alasan yang cukup bagi Tokyo untuk berbagi beban dan persepsi dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan, terutama perspektif strategi Amerika Serikat dalam menyikapi pesatnya kemampuan militer China serta kemungkinan perbenturan dua proyeksi kekuatan utama tersebut di Asia Pasifik di masa depan (http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/aliansi_jepang_amerika_serikat.pdf, diakses pada 21 Agustus 2015)

4.1.1.4.1 *Japan-United State (US) Security Treaty*

Perjanjian Kerjasama dan Keamanan Antara Jepang dan Amerika Serikat. Jepang dan Amerika Serikat, berkeinginan untuk memperkuat ikatan perdamaian dan persahabatan tradisional yang ada di antara mereka, dan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum, Menginginkan lebih lanjut untuk mendorong kerja sama ekonomi yang lebih erat antara mereka dan untuk mempromosikan kondisi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan di negara-negara mereka, Menyadari bahwa mereka memiliki hak yang melekat pada pertahanan diri individu atau kolektif sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mengingat bahwa mereka memiliki perhatian bersama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di Timur Jauh.

Perjanjian ini terdiri dari Pasal 1 sampai Pasal 10 yang isinya sebagai berikut:

1. Pasal 1, yang intinya adalah kedua pihak berusaha menyelesaikan segala macam konflik dan ancaman yang ada dengan cara damai atau menahan diri untuk menyelesaikan konflik dan ancaman dari penggunaan kekerasan
2. Pasal 2, intinya berusaha menghilangkan segala konflik dalam kebijakan ekonomi internasional dan akan mendorong kerjasama mereka dalam bisang ekonomi

3. Pasal 3, bergotong royong akan mempertahankan dan dan mengembangkan, tunduk pada ketentuan-ketentuan konstitusional mereka, kapasitas mereka untuk menahan serangan bersenjata
4. Pasal 4, intinya kedua pihak akan selalu berkonsultasi tentang pelaksanaan perjanjian ini, dan atas permintaan salah satu Pihak, kapan keamanan Jepang atau perdamaian dan keamanan internasional di Timur Jauh terancam
5. Pasal 5, setiap pihak mengakui bahwa segala serangan bersenjata ke salah satu pihak di wilayah administratif Jepang akan berbahaya bagi keamanan dan perdamaian, dan setiap serangan bersenjata akan dilaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah-langkah tersebut harus dihentikan jika Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional
6. Pasal 6, untuk memberikan kontribusi bagi keamanan Jepang dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di Timur Jauh, Amerika Serikat diberikan penggunaan oleh lahan, udara dan angkatan laut fasilitas dan daerah di Jepang
7. Pasal 7, Perjanjian ini tidak mempengaruhi dan tidak akan ditafsirkan sebagai mempengaruhi dengan cara apapun hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tanggung jawab PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional

8. Pasl 8, Perjanjian ini akan diratifikasi oleh Jepang dan Amerika Serikat sesuai dengan proses konstitusi masing-masing
9. Pasal 9, Perjanjian Keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat ditandatangani di kota San Francisco pada 8 September 1951
10. Pasal 10, Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai menurut pendapat Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat setelah sepuluh tahun salah satu pihak dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian, dalam hal ini Perjanjian akan berakhir satu tahun setelah pemberitahuan tersebut telah diberikan (http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html, diakses pada 15 Mei 2015)

Kemudian bagian dari *Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America* yang mengatur Mengenai Fasilitas dan Area dan Status Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Jepang, yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 25 Januari 2008, Memperhatikan situasi yang melibatkan kedua negara, Menyadari bahwa, untuk tujuan memastikan operasi yang efektif dari angkatan bersenjata Amerika Serikat, perlu mengambil langkah-langkah khusus baru yang berkaitan dengan Pasal XXIV *Status of Forces Agreement*, telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal I

Jepang akan menanggung, selama tahun fiskal Jepang 2011 hingga 2015, seluruh atau sebagian dari pengeluaran dalam membayar upah berikut untuk para pekerja:

(A) gaji pokok, upah harian pekerja harian, khusus karyawan jangka gaji, jam

membayar karyawan sementara per jam membayar dan upah tenaga teater;

(B) tunjangan daerah, tunjangan debit, tunjangan keluarga, tunjangan daerah terpencil, tunjangan kerja khusus, tunjangan musim panas, tunjangan akhir tahun, tunjangan daerah dingin, tunjangan pensiun termasuk tunjangan pensiun bagi pekerja yang dipisahkan oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat atau oleh organisasi diatur dalam ayat 1 (a) Pasal XV dari Status of Forces Agreement melalui pengurangan berlaku dan untuk pekerja yang di PHK untuk cacat terhubung tugas-atau kematian karena cedera terhubung tugas-atau sakit, bonus pesangon bagi karyawan yang terkena dampak disengaja oleh penurunan kekuatan, bonus pro rata untuk karyawan yang terkena pengurangan kekuatan, tunjangan pergantian, tunjangan konversi, konversi tunjangan jabatan, tunjangan tugas malam, tunjangan perumahan, tunjangan tugas tanpa pendamping, penyisihan transfer wide-area, upah lembur, jam membayar karyawan sementara membayar premi, liburan gaji, malam diferensial, tunjangan non-kerja dan upah harian resmi untuk terhubung tugas-penyakit atau cedera untuk jam membayar karyawan sementara; dan

(C) penyisihan pembayaran sekaligus untuk pelaut untuk cuti tahunan tidak dijalankan, tunjangan kargo berbahaya, tunjangan keterlibatan, tunjangan ruang mesin, tunjangan kerja mesin, tunjangan pemadam kebakaran, bonus kapal asing, tunjangan perjalanan luar negeri, tunjangan tenaga kerja, pelaporan tunjangan, kecil tunjangan kapal, tunjangan tanker, tunjangan penyeretan dan menguasai dan tunjangan *chief engineer*.

Pasal II

Jepang akan menanggung, selama tahun fiskal Jepang 2011 hingga 2015, seluruh atau sebagian dari pengeluaran dalam membayar biaya berikut yang diperoleh untuk tujuan resmi di Jepang oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat, atau oleh lembaga berwenang pengadaan angkatan bersenjata Amerika Serikat pada sertifikasi yang sesuai:

(A) listrik, gas, air bersih dan pembuangan air kotor dari utilitas publik; dan

(B) bahan bakar untuk pemanas, memasak dan pasokan air panas tidak termasuk dalam (a) di atas.

Pasal III

Berkenaan dengan pelatihan angkatan bersenjata Amerika Serikat menggunakan fasilitas tertentu dan daerah di antara mereka fasilitas dan area penggunaan yang diberikan kepada Amerika Serikat dalam Pasal VI dari Traktat (selanjutnya disebut sebagai "fasilitas dan daerah"), dalam kasus di mana Amerika Serikat,

atas permintaan dari Pemerintah Jepang yang dibuat pada Komite Bersama yang diatur dalam ayat 1 Pasal XXV *Status of Forces Agreement* (selanjutnya disebut "Komite Bersama"), perubahan penggunaan fasilitas dan daerah lain atau dalam kasus di mana Amerika Serikat, atas permintaan dari Pemerintah Jepang dibuat di Komite Bersama yang dianggap tepat oleh Pemerintah Jepang, perubahan penggunaan tempat untuk pelatihan angkatan bersenjata Amerika Serikat di wilayah di bawah administrasi Amerika Serikat, daripada menggunakan fasilitas kata tertentu dan daerah-daerah atau bagian dari pelatihan mengatakan, Jepang akan menanggung semua atau bagian dari tambahan belanja insiden untuk perubahan tersebut, dengan ketentuan bahwa Pemerintah Jepang, pada pembuatan disebutkan permintaan atas, memberitahukan Pemerintah Amerika Serikat bahwa Jepang akan menanggung pengeluaran sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Pasal V

Jepang akan menentukan, untuk setiap tahun fiskal Jepang, bahwa Jepang akan menanggung jumlah sebenarnya dari pengeluaran dalam Pasal I, Pasal II dan Pasal III masing-masing dan akan segera memberitahukan Amerika Serikat dari penentuan tersebut.

(http://www.state.gov/documents/organization/163490.pdf, diakses 15 Mei 2015)

4.1.1.4.2 Garis Besar Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat

Garis Besar Kerjasama Pertahanan Jepang dan Amerika Serikat disetujui pada *Security Consultative Committee*. Isinya antara lain adalah:

a. *Objectives of the Guidelines*

   Garis besar kerjasama pertahanan ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat lebih efektif dan solid di bawah situasi normal, situasi ketika Jepang diserang dan situasi di sekitar Jepang.

b. *Matters for Cooperation Prescribed in the Guidelines*

   1. *Cooperation under Normal Circumstances*

Kedua negara akan meningkatkan kerjasama agar dapat semakin erat yang diperuntukkan bagi pertahanan Jepang dan bagi terciptanya keamanan internasional yang lebih stabil serta akan tetap menjalin kerjasama di berbagai bidang di bawah situasi normal. Sejumlah kerjasama yang dilakukam amtara lain konsultasi kebijakan dan informasi, dialog keamanan dan pertukaran pertahanan, *UN Peacekeeping Operations* dan *international humanitarian operations*, kerjasama pertahanan bilateral, meningkatkan latihan militer bersama dan membangun mekanisme koordinasi bilateral

2. *Actions in Response to Armed Attack against Japan*

Kerjasama bilateral untuk merespon serangan bersenjata terhadap Jepang merupakan aspek penting dalam kerjasama pertahanan kedua negara

a. *Alliance Transformation: Advancing United States-Japan Security and Defense Cooperation*

Jepang dan Amerika Serikat menyepakati ”*Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement*” pada 13 februari 2007 dan hal yang paling difokuskan adalah masalah Korea Utara. Maka dari itu, tujuan strategis bersama yang disepakati adalah:

1. Mencapai denukliriasasi Korea Utara melalui *Six-Party Talks* dan memperhatikan mengenai normalisasi hubungan Korea Utara, Amerika Serikat dan Jepang
2. Menyadari kontribusi China dalam keamanan regional dan global serta mendorong China untuk meningkatkan transparansi dalam anggaran militernya
3. Meningkatkan kerjasama untuk memperkuat kerjasama dalam APEC sebagai forum ekonomi regional yang memiliki peran penting dalam mencapai stabilitas, keamanan, dan keamakmuran di kawasan
4. Mendukung usaha ASEAN dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, pemerintahan yang baik, aturan hukum, kebebasan, dan ekonomi pasar dalam Asia Tenggara, serta membangun kerjasama regional pada isu-isu keamanan tradisional dan transnasional secara bilateral melalui ASEAN *Regional Forum*
5. Memperkuat kerjasama trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Australia termasuk dalam hal keamanan dan pertahanan berdasarkan nilai-nilai demokrasi
6. Mencapai kerjasama yang lebih erat antara Jepang dan NATO mengingat NATO memberikan kontribusi global bagi perdamaian dan keamanan serta tujuan strategis dalam aliansi Jepang dan Amerika Serikat

b. *Role, Missions, and Capabilities*

Untuk lebih mempererat kerjasama bilateral antara Jepang dan Amerika Serikat, maka terdapat sejumlah peranan, misi, dan kapabilitas angkatan bersenjata Jepang dan Amerika Serikat, yaitu:

1. Redefinisi misi utama angkatan bersenjata Jepang termasuk dalam operasi perdamaian internasional, bencana alam, dan respon terhadap situasi di sekitar Jepang yang merefleksikan perhatian pada pentingnya kontribusi Jepang untuk meningkatkan keamanan internasional.
2. Terdapat kesepakatan substantif di antara kedua pemerintah yang fokus kepada keamanan bagi perlindungan informasi militer, yang dikenal dengan *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA). GSOMIA akan memfasilitasi pertukaran informasi serta membangun program intelijen dan pertahanan antara kedua negara.
3. Membangun kerjasama bilateral dalam *Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense Working Group* untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata kedua negara dalam menghadapi senjata kimia, biologi, radiologi, dan nuklir serta memfokuskan pada kapabilitas operasional untuk menghadapi serangan senjata pemusnah massal (http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/aliansi_jepang_amerika_serikat.pdf, diakses pada 21 Agustus 2015).

4.1.2 Analisa Hasil Uji Validitas & Realibilitas

Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian atau informan sangatlah penting bahkan kunci utama. Sebab, subyek penelitian adalah orang yang benarbenar tahu dan terlibat dalam suatu penelitian, serta mendukung peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang nantinya data tersebut akan diolah, dianalisis, dan disususn secara sistematis oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti memastikan dan memutuskan siapa yang berhak memberikan informasi yang relevan sehingga mampu menjawab pertanyaan peneliti.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti telah memperoleh data dari berbagai sumber yang dilakukan melalui studi pustaka berupa tulisan atau artikel, penulusan data online berupa data yang berasal dari situs-situs tertentu, metode dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, dan sebagainya dan wawancara dengan melakukan studi lapangan ke lembaga-lembaga terkait. Untuk menguji validitas dan realibilitas data yang telah diperoleh peneliti mengkases situs-situs resmi pemerintah dan lembaga-lembaga serta mengkonfirmasi ke lembaga-lembaga terkait yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Situs resmi Pemerintah Jepang, Situs Resmi Pemerintah Amerika Serikat.

Dalam menguji Valibilitas dan Reabilitas mengenai data-data yang diperoleh oleh peneliti berupa gambaran umum tentang ketergantungan yang terjalin antara Jepang dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Peneliti

melakukan konfirmasi dengan mendatangi langsung Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, serta mengakses situs resmi pemerintah Jepang. Dalam situs tersebut tertulis apa saja yang menjadi kepentingan nasional Jepang yang mendorong terjadinya pola ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat untuk serta menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Jepang dari ancaman yang ada, dan semua informasi dipublikasikan secara resmi melalui situs-situs tersebut yang sudah di uji kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan maka situs tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji data yang telah diperoleh.

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hubungan Jepang terhadap Amerika Serikat di Bidang Pertahanan

Sebelum akhir dari Perang Dunia kedua (PD II) Jepang merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuatan militer yang cukup diperhitungkan. Selain memiliki nasionalisme yang tinggi, Jepang juga di dukung dengan kekuatan militer yang maju dengan teknologi yang sudah maju pada zaman itu, membuat rakyat Jepang pun sangat membangga-banggakan kekuatan militer yang mereka miliki.

Namun kenyataan pahit nampaknya harus diterima Jepang setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki sebagai bentuk balasan Amerika Serikat atas penyerangan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika, Pearl Harbour.

Dengan hancurnya kedua kota tersebut membuat Jepang tidak berdaya dan pada akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat pada 14 Agustus 1945. Sebagai negara yang kalah perang dan memiliki nilai tawar yang rendah Jepang diwajibkan tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang diajukan oleh sekutu (AS). Ini adalah awal dimana Jepang tidak memiliki kekuatan militer secara aktif, dan tidak lagi dapat mempertahankan kedaulatannya secara mutlak. Dalam arti Jepang yang menganut sistem militer pasif tidak dapat dengan sendiri atau secara mandiri mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Jepang sangat membatasi langkahnya dalam bidang militer, hal tersebut memumbuat Jepang menjalin hubungan dengan Amerika Serikat sebagai sekutunya untuk ikut serta dalam membantu Jepang mempertahankan kedaulatannya dan juga menjaga Jepang dari situasi tidak stabil di kawasan Asia Timur.

Sebagai bukti bahwa Jepang sangat membatasi pengembangan kekuatan militernya adalah dengan adanya Pasal 9 dalam konstitusi Jepang yang sangat membatasi kekuatan militer yang ada di Jepang. Berikut adalah isi dari Konstitusi Pasal 9 Jepang: (1) Bercita-cita tulus untuk sebuah perdamaian internasional yang didasarkan pada keadilan dan ketertiban, orang-orang Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian perselisihan internasional. (2) Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, darat, laut, dan angkatan udara,

serta potensi perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak negara untuk berperang tidak akan diakui.

Amerika Serikat mengambil alih sistem pemerintahan Jepang yang harus tunduk di bawah sistemnya sesuai *Potsdam Declaration* dan Jepang harus mengakui Douglas Mac Arthur sebagai Komandan tertinggi kekuatan sekutu Pasifik, selaku *officer* pendudukan di Jepang. Dan demi keamanan dunia, Sekutu juga melakukan perubahan terhadap konstitusi Jepang yang mengisyaratkan agar Jepang tidak lagi mengembangkan kekuatan militer di kemudian hari

Pada konstitusi tersebut jelas bahwa Jepang tidak akan berpartisipasi dalam segala bentuk kekerasan maupun peperangan, dengan kata lain sebagai negara dengan pasukan militer yang pasif mengharuskan Jepang untuk tergantung pada kekuatan militer yang lebih besar untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah dan kedaulatannya dari ancaman yang sekiranya dapat membahayakan Jepang, terlebih lagi kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang rawan akan konflik.

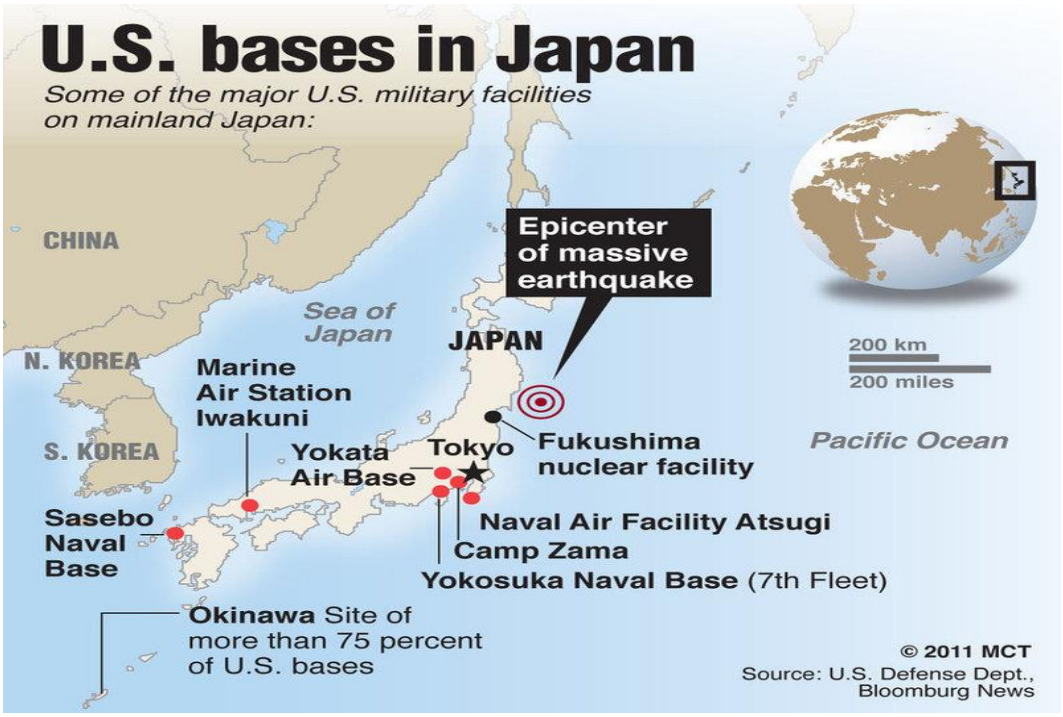
Selama Pasal 9 dalam konstitusi tersebut tidak pernah berubah, maka selama itu pula Jepang tidak akan mampu memiliki militer yang dapat mempertahankan kedaulatannya sendiri. Karena konstitusi tersebut dengan jelas membatasi segala macam bentuk kekuatan militer untuk dikembangkan.

Selain konstitusi Pasal 9 tersebut, ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat terlihat jelas dari teknologi militer yang digunakan untuk membuat pesawat tempur Jepang adalah teknologi yang dipinjamkan atau

dilindungi hak ciptanya oleh Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian *U.S.-Japan Cooperative Development*. Sehingga bila terjadi sebuah kerusakan, maka yang berhak untuk memperbaiki dan memperbaharui adalah teknisi dari Amerika Serikat, sedangkan pihak Jepang tidak boleh sama sekali memperbaiki, meniru, membuat teknologi militer untuk dirinya sendiri tanpa adanya persetujuan dari Amerika Serikat, walaupun Jepang memiliki teknologi untuk membuat dan mengembangkan teknologi militernya sendiri.

Bukti lain dari ketergantungan Jepang terhadap Amerika Serikat adalah, Amerika Serikat selalu menjadi penentu dari langkah Jepang untuk menentukan kebijakan bagi pertahanan dan keamanan Jepang. Sebagai negara yang berdaulat seharusnya Jepang dapat menentukan kebijakannya sendiri tanpa adanya campur tangan negara lain. Sesuai dengan *Japan-US Security Treaty* pasal tiga dijelaskan bahwa kedua negara harus bergotong-royong dalam mempertahankan dan mengembangkan pertahanan, dan tunduk pada ketentuan konstitusional mereka. Sesuai dengan konstitusi Jepang yang melarang Jepang untuk ikut serta dalam kekuatan militer, mengharuskan Jepang untuk tergantung pada payung pertahanan Amerika Serikat sehingga kebijakan ini merupakan identitas politik Jepang menghadapi perkembangan regional maupun global.

Kemudian Jepang pun diharuskan untuk memberikan penggunaan wilayah darat, laut, dan udaranya untuk militer Amerika Serikat sebagai kontribusi Jepang dalam memelihara keamanan dan kestabilan perdamaian Jepang maupun Asia Timur sesuai dengan *Japan-United State (US) Security Treaty.*



Sumber: (http://japanfocus.org/-john_W_-Dower/4079/article.html, diakses 15 Mei 2015)

Gambar 4.7
Letak Pangkalan Militer Amerika Serikat di wilayah Jepang

Sebagai bukti bahwa Jepang mempersilahkan Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah darat, udara dan lautnya adalah dengan di bangunnya beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Jepang dengan tujuan untuk memberi garansi rasa aman kepada Jepang sesuai dengan *Japan-US Security Treaty* yang diperbaharui pada tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 6 pada perjanjian tersebut tertulis bahwa Jepang menyiapkan segala keperluan yang diperlukan Amerika Serikat untuk mempertahankan keamanan Jepang, dan Amerika Serikat akan menyediakan perlengkapan-perlengkapan dan alat-alat yang dibutuhkan Jepang.

Sebagai contoh bahwa Amerika serikat sangat berperan dan bisa dibilang menguasai sebagian besar sistem pertahanan Jepang dapat terlihat dari Okinawa, salah satu prefektur di Jepang. Okinawa yang menjadi pusat pangkalan militer Amerika Serikat ini hampir sebanyak 75% wilayah yang dipenuhi oleh enam lingkungan masyarakat, yaitu: 82,8% di Kota Kadena, 59,8% di Kota Kin, 56,4% di Kota Chatan, 51,5% di Kota Ginoza, 46,9% di Kota Yomitan, dan 41,5% di Desa Higashi dikuasai oleh Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga mengontrol 29 wilayah lautan dan 15 wilayah udara di Okinawa. Dua dari tiga bandar udara dijalankan oleh Amerika Serikat.

Dikala seluruh wilayah Jepang lainnya menikmati pertumbuhan ekonomi yang cepat, masyarakat di Okinawa justru merasakan hal yang sebaliknya, karena posisi Okinawa yang bisa dikatakan dikontrol pada dua struktur yaitu struktur Jepang dan struktur Amerika Serikat yang dikenal sebagai struktur *Triangle.* Dan kemudian struktur ini yang kemudian membuat struktur dependensi antara Okinawa dan Jepang, serta mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi di Okinawa yang dikontrol oleh Jepang yang berpihak pada keberadaan basis militer Amerika Serikat disana.

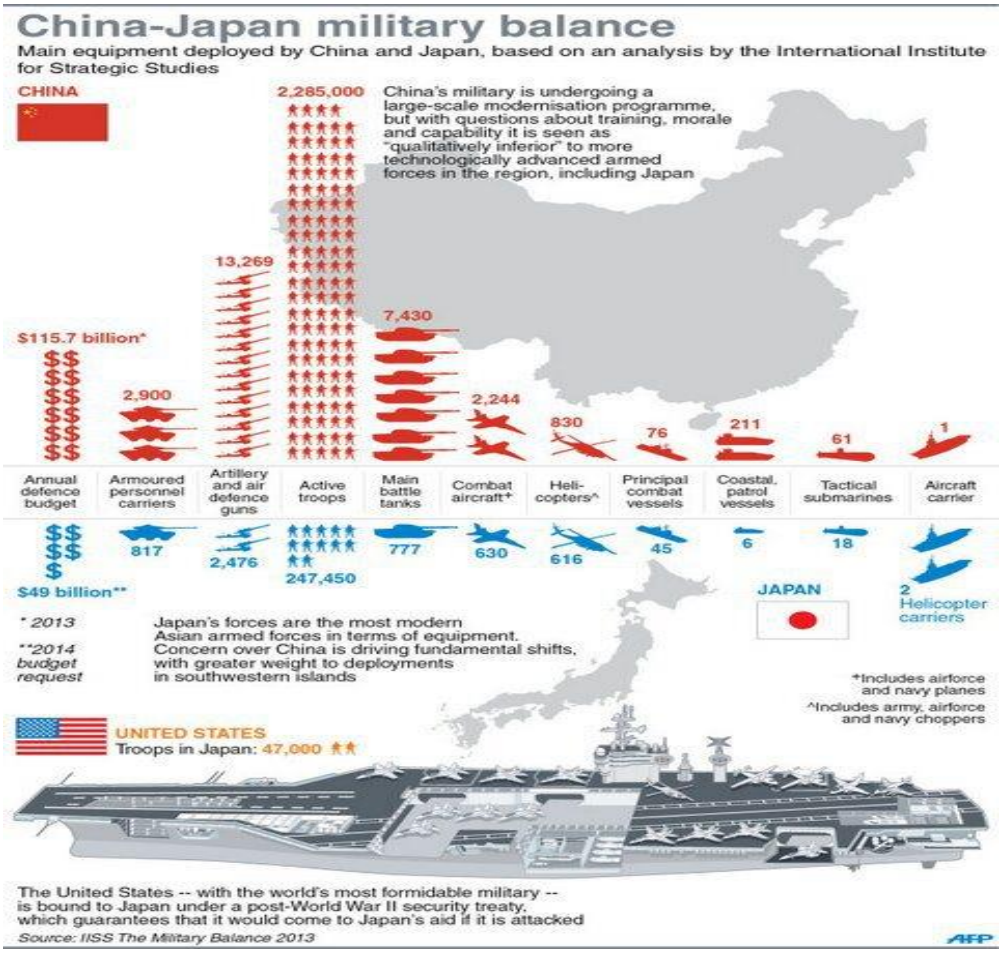
Dari sistem dependensi tersebutlah maka perekonomian Okinawa sangat tergantung pada aktifitas basis-basis militer Amerika Serikat disana. Karena sebanyak 40.000 masyarakat Okinawa bekerja di dalam basis-basis militer AS. Hal ini dipilih karena bekerja di basis-basis tersebut lebih menjanjikan daripada pekerjaan lain di Okinawa. Pendapatan perbulan yang didapatkan dari bekerja di

basis militer Amerika Serikat sebesar 311.000 Yen dibandingkan hanya menjadi *Tour Guide* ataupun operator telepon dan pekerjaan lainnya sebesar 298.800 Yen dan bisa kurang dari itu.

Kemudian masalah kontrol udara di Okinawa juga merupakan salah satu yang dikuasai Amerika Serikat. Setiap pesawat yang akan terbang ataupun mendarat di Okinawa haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak pangkalan udara Amerika Serikat. Tidak hanya yang melalui pangkalan udara AS, namun semua penerbangan komersialpun harus mendapat persetujuan dari sana. Dan juga penerbangan AS harus diutamakan dibandingkan penerbangan lokal. Jika ada pesawat lokal yang akan terbang bersamaan dengan pesawat milik AS, maka yang diprioritaskan adalah pesawat AS terlebih dahulu. Semua fakta yang ada menunjukkan seberapa besar ketergantungan yang terjadi antara Jepang dengan Amerika Serikat sehingga Jepang bisa membagi kekuasaan wilayahnya yang bisa dikatakan sebagai halaman belakang bagi Jepang dengan negara lain, sehingga akan terlihat bahwa Okinawa merupakan bagian Jepang tetapi sangat tergantung pada kebijakan dari Amerika Serikat.

Selain itu kekuatan militer Jepang walaupun memiliki teknologi yang tidak kalah canggih dengan militer yang dimiliki negara-negara tetangganya tetapi dirasa tertinggal apabila Jepang sejak kekalahannya pada Perang Dunia ke II tidak lagi mengembangkan kekuatan militernya. Memang Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan perkembangan kekuatan militernya.

Oleh sebab itu untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara tetangganya seperti Cina dan Korea Utara yang telah lebih dulu mengembangkan dan juga memperkuat pasukan militernya dari tahun ke tahun dirasa berat untuk Jepang sebagai negara yang pasif militer. Untuk itu satu-satunya jalan keluar untuk menstabilkan kekuatan pertahanannya Jepang harus selalu ketergantungan dengan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kekuatan militer besar.



Sumber: (http://punditfromanotherplanet.com/2013/12/05/graphic-china-japan-military-balance/, diakses pada 12 Agustus 2015)

Gambar 4.8
Perbandingan Kekuatan Militer Jepang dan China

Seharusnya sebagai negara yang berdaulat dan maju Jepang memiliki kekuatan militernya sendiri tanpa harus tergantung dengan kekuatan militer lainnya. Sebagai negara yang hanya memiliki *Defense Force* saja tentu Jepang telah membaca apa saja potensi-potensi apa saja yang bisa mengancam kedaulatanny dengan tindakan preventif seperti mengkonsentrasikan keamanan nasionalnya pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola dengan baik maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang kongkrit. Jadi untuk menutupi kekurangannya Jepang membentuk kerjasama atau aliansi dengan Amerika Serikat dengan cara Jepang bisa menyerang di dalam kawasan kedaulatan Jepang dengan alasan untuk mempertahankan diri, dan di dunia internasional Amerika Serikat yang akan berperan sebagai perwakilan Jepang untuk menyelesaikan konflik yang ada.

4.2.2 Penentangan Rakyat Jepang Terhadap Pembangunan Kembali Militer Jepang

Jepang harus menerima kenyataan bahwa Jepang adalah satu-satunya negara di dunia yang di jatuhi bom atom sampai dua kali. Hal tersebut selain menimbulkan kerusakan yang parah, kehancuran di segala sektor, penyakit yang timbul pasca bom atom, tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang sangat mendalam bagi masyarakat Jepang sampai saat ini.

Rakyat Jepang yang dulu berfikir bahwa Jepang sebagai negara yang kuat yang memiliki militer tangguh yang dapat membawa Jepang kepada kemakmuran

dan perdamaian nyatanya harus menderita akibat kekalahan telak Jepang pada Perang Dunia II. Untuk itu sampai saat ini rakyat Jepang selalu menolak Jepang untuk ikut serta dalam segala bentuk peperangan maupun memperkuat kekuatan militernya, dengan alasan rakyat Jepang takut akan terulang kekelaman masa lalu jika Jepang memperkuat pasukan militernya.

Beberapa wacana pemerintah Jepang untuk mengubah konstitusi Pasal 9 pun selalu mendapat tanggapan yang tidak baik dari masyarakat Jepang. Banyak yang melakukan aksi demo secara besar-besaran bahkan sampai sebanyak puluhan ribu masyarakat Jepang sebagai bukti bahwa mereka menolak dengan keras keinginan pemerintah Jepang untuk mengubah Pasal 9 dari konstitusi Jepang.

Selain berdemo, bukti penolakan lainnya yang dilakukan oleh seorang warga negara Jepang adalah dengan cara membakar dirinya sendiri karena tidak setuju untuk perubahan konstitusi tersebut. Selain itu pembakaran diri lainnya dilakukan karena hanya dengan mendukung tindakan Amerika tersebut bertentangan dengan konstitusi Jepang yang menolak keikutsertaan Jepang dari segala macam bentuk peperangan.

Penolakan masyarakat Jepang atas pembentukan kembali kekuatan militernya selain dikarenakan rasa trauma yang sampai detik ini masih menghantui mereka, tetapi juga sangat bersebrangan dengan Konstitusi Pasal 9 Jepang yang melambangikan bahwa Jepang adalah negara yang cinta damai, jauh dari peperangan dan kekerasan yang membawa Jepang terdahulu menjadi negara yang hancur dsan menyisakan banyak kepedihan bagi rakyatnya, maka sangat

beralasan bahwa rakyat Jepang menentang segala bentuk keikut sertaan Jepang dalam peperangan maupun pembentukan militernya kembali.

Sesuai kepentingan nasional nya, Jepang pun hanya memfokuskan dengan bidang ekonomi dimana bidang pertahanan sudah ditangani oleh Amerika Serikat dan Jepang harus mengakui Douglas MacArthur sebagai komandan tertinggi dan selaku *officer* pendudukan di Jepang. Jadi masyarakat Jepang berfikir Jepang tidak harus lagi terlibat dalam segala jenis peperangan karena Amerika Serikat sudah menjamin keamanan dan pertahanan untuk kedaulatan Jepang.

Rakyat Jepang berfikir seharusnya memang negaranya tidak lagi ikut serta dalam kegiatan militer yang ada, karena keamanan dan pertahanan bagi Jepang sudah di jamin oleh Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang. Jadi tindakan untuk memperbaharui pasal 9, tindakan memperkuat kembali kekuatan militer Jepang, dan kegiatan militer lainnya menjadi sebuah topik yang sangat sensitif bagi rakyat Jepang.

4.2.3 Perkembangan Pertahanan Militer Jepang di Masa Yang Akan Datang

Jepang masa sekarang bisa dikatakan mengalami situasi yang sangat dilematis, dimana banyaknya tekanan yang dirasakan dari dalam maupun dari dunia Internasional. dunia Internasional mengharapkan agar Jepang mampu mandiri untuki membangun militernya sendiri, karena selama ini bantuan Jepang hanya dari segi finansial dirasa tidak cukup dan tidak adil dalam upaya negara-

negara untuk menjaga keamanan internasional. jepang dituntut lebih berpartisipasi sepenuhnya baik secara finansial maupun secara militer.

Desakan dari dalam negeri pun tidak kalah hebatnya, namun kondisinya terbalik dimana mayoritas masyarakat Jepang menolak untuk kembalinya Jepang membangun kekuatan militernya, karena dengan alasan bersebrangan dengan konstitusi Jepang dan juga pukulan traumatis dari kisah kelam masa lalu yang dilewati Jepang pasca kekalahannya pada Perang Dunia II. Hal ini membuat Jepang di posisi yang dilema, antara membangun kembali kekuatan militernya atau tidak. Jika memutuskan untuk kembali membangun kekuatan militer tentunya desakan dari dalam negeri akan membuat situasi di dalam negeri tidak kondusif karena adanya penolakan. Sedangkan bila tidak membangun kembali kekuatan militernya maka desakan dari dunia internasional pun akan menganggap Jepang hanya sebagai negara yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia.

Dari segala permasalahan yang ada, Jepang memiliki sebuah strategi yang dianggap akan menguntungkan bagi Jepang di masa yang akan datang. Jepang memanfaatkan kondisi dimana seakan-akan pembangunan militer yang dilakukan Jepang merupakan suatu keharusan yang dipaksakan dari kondisi di luar Jepang ataupun situasi di sekitar Jepang.

Strategi ini dinilai sebagai salah satu strategi cerdas karena pembangunan kekuatan militer yang dilakukannya mendapat pembenaran dari dalam dan luar negeri karena akan terlihat bahwa pembangunan yang dilakukan Jepang

merupakan desakan yang dirasakan Jepang dari kondisi sekitarnya yang mengharuskan Jepang untuk memperkuat pertahanannya.

Sebenarnya peningkatan kekuatan militer Jepang sudah terlihat dari beberapa tahun sebelumnya, walaupun masih berupa JSDF (*Japan Self Defense Force*) tetapi Jepang selalu cerdik untuk dapat menambah jumlah kekuatan milkiternya melalui situasi-situasi yang mengharuskan Jepang menambah jumlah pasukannya atas permintaan Amerika Serikat guna menunjukan keseriusan Jepang untuk mendukung Amerika Serikat yang merupakan sekutunya sebagai polisi dunia internasional. tentu saja hal seperti ini sangat menguntungkan Jepang melihat kondisi Jepang yang tidak akan mungkin secara terang-terangan untuk menambah ataupun memperkuat kekuatan militernya.

Dalam sistem pertahanan baru tersebut Jepang mengembangkan kemampuan untuk *counter cyber-attack* dan mengamankan teknologi informasi serta jaringan internasional. kemudian mengembangkan pertahanan anti nuklir, serangan kimia dan biologi, serta membuat pertahanan untuk serangan tidak terduga. Dana yang diterima kabinet Jepang untuk melaksanakan MTDP tersebut sejak 5 Desember 2000 sampai tahun 2005 adalah sebesar 25 triliun Yen.

Disini mulai tergambar bagaimana cara Jepang untuk menambah dan memperkuat pertahanan militernya dengan memanfaatkan situasi yang ada. Selain berhasil menambah jumlah personil militernya, Jepang juga telah memperbaharui sistem pertahanannya sedikit lebih moderen. Pembaharuan yang sangat terlihat perubahannya secara signifikan terlihat dari segi persenjataan dan peralatan

pertahanan dan keamanan Jepang seperti lima area angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, *IT Network, Research and Development.* Dalam program ini disebutkan tentang kerjasama dengan Amerika Serikat dalam *research and development* di bidang pengembangan *theater missile defense, Fixed wing maritime patrol/ ASW P-3C dan C-1 transport replacement,* pembangunan *defense information infrasructure (triservice computer integration program, dan Common operating environment*. Moderenisasi ini menyebabkan Jepang memiliki kekuatan misil yang canggih serta akan sangat unggul dalam peningkatan kinerja persenjataan dan peralatan militer.

Dengan adanya pembaharuan sistem seperti tentu saja dapat memberikan keuntungan bagi Jepang, selain menjadi lebih efektif lagi dari segi militer dengan kemampuan dan teknologi yang lebih maju untuk sistem pertahanan dan keamanan dibandingkan harus merekrut banyak pasukan. dan ini merupakan langkah awal dimana Jepang dapat mengembangkan sistem pertahanannya ke taraf untuk mandiri secara perlahan.

Kemudian situasi lain yang dimanfaatkan Jepang adalah dengan basis fokus utama Jepang yang hanya tertuju pada sektor ekonomi, maka Jepang memanfaatkan pembangunan industri besar alat otomotif dan teknologi yang nantinya dapat memproduksi alat-alat perang yang canggih dengan kamuflase Jepang mengembangkan dan membangun industri tersebut hanya sebagai salah satu cara memperoleh keuntungan ekonomi. Padahal nyatanya Jepang yang dikenal sebagai negara pasifis ini adalah negara yang menempati ukuran ketiga

untuk negara pengekspor senjata (di kawasan Asia-Pasifik) dengan total jumlah keuntungan ratusan juta dollar

Tabel 4.2 Produksi Industri Militer Jepang

Produk	Perusahaan	Kegunaan/ Fungsi
Elektronik Presisi	TDK, Nippon Musen, Nippon Glass	Pesawat dan rudal dilapisi dengan bahan ini tidak akan terdeteksi jika musuh menggunakan radar. gelombang radar akan diserap
Perangkat Kopling Pemberat	Sony, Matshushita	memiliki kemampuan untuk melihat seperti mata manusia. Jika diinstal pada rudal, dan lainnya, Itu akan sangat meningkatkan fungsi sebagai petunjuk
Keramik	Kyocera, Nippon Glass	Selain digunakan untuk baju besi untuk tank dan untuk mesin turbin gas, di masa depan kemungkinan akan digunakan untuk kapal laut dan pesawat.
Serat Optik	Sumitomo Electric, Mitsubishi Rayon, Aviation Electronics,	Ini yang semakin digunakan untuk komunikasi di pesawat terbang dan kapal angkatan laut karena juga sedang dilakukan dalam pemanfaatan untuk di bawah tanah
Alat deteksi kapal selam	Nippon Musen, Oki Electric, Nec	memancarkan gelombang supersonik dari laut dan memproses cepat sehingga informasi mendeteksi musuh kapal selam
Alat kontrol elektronik untuk penerbangan	Aviation Electronics	

Serat karbon	Toray, Toho Rayon, Mitsubishi Electric, Yokohama Rubber	Penelitian terapan untuk digunakan di pesawat terbang mencapai nada tinggi
Radar laut dan darat	Mitsubishi Electric, NEC,etc.	
Pembuat Teknologi lainnya dengan kemampuan terkait: • Tamura, pembuat pemancar • Toyo Telecommunications Exclusive, pemasok alat pendeteksi musuh • Hitachi Electronics, simulator pesawat terbang • Kokusai Electric, alat komunikasi dan simulator • Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, Fuji Heavy Industries, Mitsubishi Steel, suplai untuk rudal jelajah, tank, kapal angkatan laut. ○ Rudal jelajah: rudal jelajah ini dapat diluncurkan dari setiap jenis alat, seperti kapal selam, pesawat terbang dan kendaraan tempur. ○ Tank: mengadopsi berbagai sistem pengendalian kebakaran dan perangkat tembak otomatis, memanfaatkan penuh teknologi optik dan elektronik Jepang.		

Sumber: (*US-Japan Military Technology Exchange–Japan to Scale America's last Export Bastion di dalam www.globalsecurity.org/world/japan*. Diakses pada 21 Mei 2015)

Faktor lain yang menunjukkan peningkatan kekuatan militer Jepang adalah dengan ditandainya beberapa kali mengadakan amandemen untuk pasal 9 di konstitusinya, walaupun hal itu mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat dalam negerinya. Karena Jepang menginginkan kemandirian secara pertahanan dan militer. Walaupun secara konvensional Jepang memiliki militer

yang pasifis namun anggaran militer Jepang menempati posisi terbesar ke lima di dunia, dan juga militernya dibekali dengan teknologi yang mutakhir.

Perubahan dari lingkungan Jepang yang membuat Jepang selalu meningkatkan teknologi dan juga anggaran militernya. Dengan bertambahnya jumlah anggaran militer Cina setiap tahun ke tahun yang membuat Jepang kemudian merasakan itu sebagai ancaman jika mengingat masalah historis dan juga masalah sengketa maritim. Selain itu ulah yang selalu dibuat oleh Korea Utara dengan selalu memperbaharui teknologi rudal-rudalnya dan juga kekuatan nuklir nya yang kemudian mengharuskan Jepang selalu menambah dan memperbaharui segala sistem pertahanan negaranya.

Hal ini didukung dengan ditambahnya anggaran militer Jepang sebesar 49 miliar dollar AS pada tahun 2014, dimana penambahan anggaran militer tersebut dianikan menjadi 3% dari GDP nya. Hal ini tentulah langkah awal Jepang untuk memperkuat militernya dasn merupakan anggaran militer terbesar sejak tahun 1992, dan merupakan titik balik karena semenjak tahun 2002 anggaran militer Jepang selalu mengalami penurunan sampai tahun 2012. Walupun begitu tetap saja peningkatan anggaran militer Jepang tersebut tidak sebanding dengan peningkatan anggaran militer Cina yang mencapai 166 miliar dollar AS atau tiga kali lebih besar dari anggaran militer Jepang.

Tetapi bagi Jepang dengan anggaran yang ada sudah mampu memperkuat pertahanan Jepang maupun sebagai anggaran untuk menjaga kepulauan yang di

sengketakan dengan Cina maupun untuk meperbaharui segala teknologi perang yang ada. Karena pertahanan yang baik adalah teknik menyerang yang kuat.

Selain itu Jepang pun mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Australia, Singapura dan Filipina untuk memperkuat militernya. Karena bagi beberapa negara di kawasan Jepang memiliki peran sentral yang strategis untuk mengimbangi kekuatan Cina. Bagi Amerika serikat pun Jepang sangat berpengaruh dalam langkah *Pacific Pivot* Amerika Serikat. Perluasan peran dan peningkatan jumlah militer Jepang ini pun didukung oleh Amerika Serikat karena akan mengurangi beban Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan ditengah keterbatasan anggarannya.